

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang serta jasa yang diproduksi pada masyarakat mengalami pertambahan dan meningkatnya kemakmuran masyarakat.¹ Salah satu hal penting yang menjadi indikator kemajuan perekonomian Negara yaitu pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi pada saat ini lebih tinggi dari tahun yang sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana perkembangan aktifitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan mampu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dimana untuk meningkatkan pembangunan nasional, maka harus didukung dengan pembangunan daerah yang sesuai. Laju pertumbuhan ekonomi daerah digunakan untuk menilai seberapa besar keberhasilan pembangunan daerah pada periode ke periode selanjutnya.²

¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011), hal. 120.

² Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 47

Setiap negara tentunya berusaha untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang paling optimal, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang mempunyai kualitas baik akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara luas.³

Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang dapat tumbuh secara signifikan dan juga mengalami kenaikan. Perekonomian tersebut mengakibatkan terjadinya kestabilan kondisi harga dan kesempatan kerja terbuka secara luas. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama satu periode tentunya tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor dan juga sub sektor yang juga ikut membentuk nilai tumbuh perekonomian suatu daerah.⁴

Berikut ini adalah tabel perbandingan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dengan Pulau lain yang ada di Indonesia dalam rentang waktu 2014-2019.

Tabel 1.1 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi

Nama Pulau	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (2014-2019)
Pulau Jawa	33.24 %
Pulau Kalimantan	28.16 %
Pulau Sumatera	27.34 %
Pulau Bali & Kep. Nusa Tenggara	33.11 %

Sumber: Badan Pusat Statistika, data diolah, 2020⁵

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa pada tahun 2014-2019 adalah 33.24%

³ Tim Biro Hubungan dan Studi Internasional- Bank Indonesia, *Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis* (Jakarta: Grasindo, 2015), hal. 57

⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal.9

⁵ <http://www.BPS.go.id> diakses 21 Juli 2021

sedangkan di Pulau Kalimantan rata-rata pertumbuhannya sebesar 28.16%, pada Pulau Sumatera jumlah rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 27,36% dan di Pulau Bali & Kep. Nusa Tenggara rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014-2019 sebesar 33.11%. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi jika dibandingkan dengan pulau lain seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Bali & Kep. Nusa Tenggara.

Selain itu, jika dilihat berdasarkan perspektif Provinsi, Laju pertumbuhan ekonomi pada provinsi di pulau jawa dalam kurun waktu enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Berikut ini tabel pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019:

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Banten	5.47	5.45	5.28	5.75	5.81	5.29	5.51
DKI Jakarta	5.91	5.88	5.88	6.20	6.17	5.89	5.99
Jawa Barat	5.09	5.05	5.66	5.35	5.66	5.07	5.31
Jawa Tengah	5.27	5.47	5.27	5.26	5.32	5.41	5.33
Jawa Timur	5.86	5.44	5.57	5.46	5.50	5.52	5.56
DI Yogyakarta	5.20	4.95	5.05	5.26	6.20	6.60	5.33

Sumber: Data BPS ⁶

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dari 6 provinsi di pulau jawa pada tahun 2014-2019 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar

⁶ www.bps.go.id diakses pada tanggal 17 januari 2021 pukul 09.25

5,99%. Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56%. Provinsi Banten menempati posisi ketiga dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51%. Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menempati posisi keempat dan kelima dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33% dan 5,33%. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah berada pada Provinsi Jawa Barat sebesar 5,31%.

Suatu perekonomian dapat dikatakan berhasil dapat dilihat dari tingkat pertumbuhannya setiap tahun. Oleh karena itu setiap daerah akan menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada saat perencanaan serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut.

Naik turunnya suatu pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi dimana seseorang yang termasuk angkatan kerja yang ingin memperoleh suatu pekerjaan namun masih belum mendapatkan pekerjaan.⁷ Pengangguran merupakan suatu masalah yang kompleks karena dapat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak mudah untuk dipahami. Jika pengangguran tidak segera diatasi maka akan menimbulkan kerawanan sosial yang dapat berpotensi mengakibatkan kemiskinan.⁸ Pengangguran yang meningkat dari tahun

⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal.13

⁸ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 9

ketahun dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. Pengangguran dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan tenaga kerja. Kondisi ini akan mengakibatkan pendapatan masyarakat menjadi menurun dan daya beli dari masyarakat ikut mengalami penurunan sehingga produktifitas pun juga akan berkurang.

Tingkat pengangguran ini dapat dikatakan penting untuk mengukur suatu keberhasilan pembangunan ekonomi. Karena pengangguran salah satu indikator dalam menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu pembangunan ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran ini dikatakan dapat mencerminkan baik ataupun buruknya kondisi perekonomian yang ada di suatu negara ataupun wilayah. Apabila jumlah pengangguran tinggi maka tenaga kerja tidak dapat terserap dengan baik ke dalam lapangan pekerjaan dan mereka akan tergolong kedalam orang yang menganggur dan kualitas taraf hidup serta kesejahteraan seseorang mengalami penurunan sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya apabila jumlah pengangguran rendah, secara tidak langsung jumlah tenaga kerja yang bekerja mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik serta mencerminkan adanya peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan kesejahteraan mengalami peningkatan.⁹ Berikut ini tabel tingkat pengangguran pada 6 Provinsi di Pulau Jawa selama 6 tahun terakhir.

⁹ Heni Wahyu Widayati, Lorentino Togar Laut, Rian Destiningsih, Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 1996-2017, *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, Vol.1 No.2, 2019, hal. 184.

Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran Terbuka pada Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Banten	484053	509383	498596	519563	494868	489825
DKI Jakarta	429110	368190	317007	346945	314841	320901
Jawa Barat	1775196	1794874	1873861	1839428	1848234	1901498
Jawa Tengah	996344	863783	801330	823938	815083	818276
Jawa Timur	843490	906904	839283	838496	850474	835130
DI Yogyakarta	67418	80245	57036	64019	73350	69170

Sumber: Badan Pusat Statistik¹⁰

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran yang ada di beberapa Provinsi Pulau Jawa pada tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi. Dimana tingkat pengangguran tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat dimana pada tahun 2014 sebanyak 1.775.196 jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 1.901.498 (jiwa). Kemudian urutan kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 843.490 sampai hingga tahun 2019 mencapai 835.130 kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 996.344 sampai pada tahun 2019 mencapai 818.276 (jiwa). Kemudian posisi keempat ditempati oleh Provinsi Banten dengan jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2014 sebesar 484.053 jiwa dan samapai tahun 2019 mencapai 489.825 jiwa. Selanjutnya di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 jumlah pengangguran sebanyak 429.110 sampai pada tahun 2019 sebesar 320.901. Sementara itu Provinsi DI Yogyakarta ini menempati posisi terakhir dengan jumlah pengangguran paling sedikit

¹⁰www.bps.go.id diakses pada tanggal 17 januari 2021 pukul. 09. 25 WIB

diantara provinsi-provinsi lain di pulau jawa yaitu pada tahun 2014 sebanyak 67.418 jiwa dan samapai pada tahun 2019 sebanyak 69.170 jiwa.

Selain itu faktor lain yang tidak kalah penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi adalah peran pemerintah. Peran dari pemerintah ini penting untuk mengatur jalannya kegiatan perekonomian, mengendalikan kestabilan ekonomi dan meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tolok ukur pertumbuhan dalam suatu perekonomian tidak dapat terlepas dari peran pengeluaran pemerintah pada bidang layanan masyarakat (publik). Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan pemerintah atas barang-barang modal barang konsumsi serta jasa-jasa.¹¹ Pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai penggunaan uang ataupun sumber daya di sebuah negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan di negara maupun pemerintahan yang berfungsi untuk mencapai kesejahteraan.¹² Pengeluaran pemerintah merupakan suatu bagian dari suatu kebijakan fiskal yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya suatu perekonomian dengan cara menentukan besar atau kecilnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah ini diukur berdasarkan total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran negara. Jadi apabila semakin besar pengeluaran pemerintah yang produktif maka semakin besar tingkat perekonomian suatu daerah.¹³

¹¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*...., hal. 61.

¹² Detri Karya dan Syamri Syamsuddin, *Makroekonomi: Pengantar Untuk Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.179.

¹³ Citra Ayu Basica Effendy Lubis, Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Economica*, Vol. 10 No 2, 2014, hal.189

Pada umumnya pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Pengeluaran pemerintah juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat dan kenaikannya mampu mendorong PDRB. Pengeluaran pemerintah tercermin didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah serta bantuan dari pusat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini adalah bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah. Sasaran penggunaan adalah untuk membiayai pembangunan sarana serta prasarana yang nantinya bisa menunjang lancarnya usaha swasta serta pemenuhan pelayanan publik/masyarakat.¹⁴ Perkembangan pengeluaran pemerintah daerah di Pulau Jawa dari tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1.4 Pengeluaran Pemerintah pada Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Pulau Jawa (Ribu Rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Banten	8.138.237. 775	9.236.214. 977	9.786.470. 314	10.265.222 .255	11.072.775 .454	12.281.829 .272
DKI Jakarta	51.418.295 .337	53.419.020 .077	59.392.458 .271	73.535.704 .732	78.671.227 .891	74.077.190 .725
Jawa Barat	25.897.424 .862	28.561.852 .475	31.344.462 .321	35.512.081 .597	36.482.714 .855	39.199.187 .033
Jawa Tengah	16.846.898 .289	18.517.590 .787	20.050.497 .701	24.349.750 .271	26.231.235 .039	27.490.556 .740
Jawa Timur	22.619.271 .001	24.678.649 .609	26.527.236 .416	31.851.419 .352	35.289.761 .233	38.411.057 .610
DI Yogyakarta	3.529.399. 058	3.911.107. 930	4.270.072. 673	5.279.617. 119	5.790.570. 834	6.173.815. 388

Sumber: Badan Pusat Statistik¹⁵

¹⁴ Adi Raharjo, Tesis: “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 Di Kota Semarang”, (Semarang :Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2006), hal. 6.

¹⁵ www.bps.go.id diakses pada tanggal 17 januari pukul 09.25

Dari tabel 1.4 diatas menunjukkan suatu fenomena bahwa pengeluaran pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana dapat dilihat bahwa Pengeluaran Pemerintah yang terjadi pada Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2014-2019 mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi di provinsi di pulau jawa mengalami fluktuatif. Dimana pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta dimana pada tahun 2014 mencapai Rp 51.418.295.337 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2019 mencapai Rp 74.077.190.725. Peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Barat, dimana setiap tahunnya pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan yang signifikan , dan disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten. Pengeluaran Pemerintah terendah terjadi di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 3.529.399.058 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 6.173.815.388. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya namun di Provinsi DI Yogyakarta ini Pengeluaran pemerintahnya lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa,

Selain Pengeluaran Pemerintah, faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut perspektif ekonomi Islam ialah dana ZIS. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Islam menganjurkan untuk menyalurkan dana zis yang mempunyai sifat dalam jangka panjang. Majunya pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat melalui peningkatan

jumlah produksi tetapi juga dilihat dari sisi kehidupan agama, sosial, kemasyarakatan.

Dalam Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, dan berfungsi untuk menjadikan harta seseorang agar selalu produktif, dengan harta yang selalu produktif maka akan mengalami peningkatan pada output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi), pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain.¹⁶ Jika zakat hukumnya wajib, maka infaq dan shadaqah hukumnya sunah. Saat ini zakat semakin mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen pembangunan manusia. Terjadinya peningkatan penyaluran dana zakat maka akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dana ZIS yang disalurkan tidak hanya digunakan untuk meningkatkan konsumsi saja namun bisa dikembangkan untuk modal kerja atau usaha yang nantinya bisa membantu meningkatkan pendapatan para mustahik. Jadi apabila pendapatan mustahik ini meningkat maka tingkat konsumsi juga semakin tinggi, dan apabila tingkat konsumsi ini semakin tinggi maka juga akan terjadi peningkatan permintaan terhadap barang serta jasa dan produksi barang/ jasa meningkat sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi semakin optimalnya penyaluran dana zis yang diberikan kepada orang-orang yang berhak dan tepat maka terjadi peningkatan kegunaan zis dan akhirnya

¹⁶ Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, *Ekonomi ZISWAQ (zakat, infak, shodaqoh dan wakaf)*, (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), hal.54

pertumbuhan ekonomi akan meningkat.¹⁷ Pada tabel 1.5 akan digambarkan penyaluran dana ZIS pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019

Tabel 1.5 Penyaluran Dana ZIS di Pulau Jawa Tahun 2014 – 2019

Provinsi	Distribusi penyaluran ZIS berdasarkan Provinsi (dalam rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Banten	1.874.866. 933	2.650.490. 720	3.102.251. 056	5.487.359.1 30	9.519.079.3 69	17.540.184. 982
DKI Jakarta	10.893.06 3.472	12.785.97 0.764	33.107.84 3.216	153.359.83 7.282	190.611.44 0.166	126.057.81 7.603
Jawa Barat	2.016.465. 964	10.020.55 4.468	14.432.31 2.425	24.028.672. 119	23.872.256. 575	32.056.265. 677
Jawa Tengah	40.000.00 0	45.000.00 0	1.283.934. 700	8.423.251.0 57	30.642.800. 936	51.083.098. 996
Jawa Timur	8.511.746. 077	6.655.456. 206	6.381.235. 884	6.464.946.9 66	7.022.348.4 29	9.587.012.7 24
DI Yogyak arta	1.084.105. 182	1.422.687. 200	1.084.920. 902	2.450.234.7 55	3.323.775.0 86	4.571.236.7 54

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta

Dari data tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang ada di Provinsi di Pulau Jawa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Meskipun ada juga yang mengalami penurunan, namun penurunan yang terjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi. Dari tabel data di atas penyaluran dana ZIS tertinggi terjadi di Provinsi Jakarta yang pada tahun 2019 mencapai Rp 126.057.817.603, kemudian penyaluran ZIS yang tinggi juga terjadi di Provinsi Jawa Barat dimana pada tahun 2014 penyaluran dana ZIS sebesar Rp 2.016.465.964 sampai tahun 2019 mencapai 32.056.265.677. Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga dalam penyaluran dana ZIS dimana pada tahun 2014 ZIS yang disalurkan

¹⁷ Ibid, hal.56

sebanyak Rp 40.000.000 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 51.083.098.996. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Banten. Sedangkan penyaluran dana ZIS terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa terjadi di Provinsi DI Yogyakarta dimana pada tahun 2014 sebesar Rp 1.084.105.182 dan sampai pada tahun 2019 mencapai Rp 4.571.236.754.

Penulis tertarik untuk meneliti Pulau Jawa karena pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa cenderung lebih tinggi, namun pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang masih cenderung belum stabil. Dan untuk periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini pada rentang waktu 2014-2019 dikarenakan data tahun terakhir yang tersedia pada publikasi resmi Badan Amil Zakat Nasional yaitu pada tahun 2019. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2019.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan identifikasi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi selama tahun 2014-2019 pada Provinsi di Pulau Jawa cenderung berfluktuatif.
2. Pengangguran selama 6 tahun terakhir di berbagai Provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuatif, hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan tenaga kerja terus mengalami peningkatan
3. Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Pulau Jawa pada tahun 2014-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami fluktuatif. Secara teori jika pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan.
4. Penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2014-2019 mengalami peningkatan dan penurunan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami fluktuatif.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019?

3. Apakah Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019?
4. Apakah Penganggura, Pengeluaran Pemerintah, dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara bersama-sama pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah, penyaluran dana zakat, infaq, sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Pulau Jawa.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi dan tambahan referensi di perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk ide-ide penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang serupa, dan mampu meningkatkan kualitas peneliti selanjutnya, sehingga bisa menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksanakannya suatu penelitian agar lebih efektif serta efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Ruang lingkup dan batasan masalah yang diberikan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang melebar dalam penelitian ini. Variabel yang akan dikaji serta diteliti dalam penelitian ini yaitu berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), dimana variabel bebas yang dimaksud adalah pengangguran (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2), zakat, infaq, sedekah (X_3). sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi (Y)

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini tidak hanya meliputi terbatasnya waktu, dana, dan tenaga yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Namun juga terbatasnya variabel makro ekonomi yang menjadi indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa. Jadi dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Variabel Bebas / Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel lain.

- 1) Pengangguran adalah suatu kondisi dimana seseorang yang termasuk angkatan kerja yang ingin memperoleh suatu pekerjaan namun masih belum mendapatkan pekerjaan.¹⁸
- 2) Pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai penggunaan uang ataupun sumber daya di sebuah negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan di negara maupun pemerintahan yang berfungsi untuk mencapai kesejahteraan.¹⁹
- 3) Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

Zakat ialah hak berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan dan diberikan kepada kelompok tertentu serta dalam waktu tertentu.²⁰Infaq menurut pengertian umum adalah mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Infaq dapat bermakna positif ataupun negatif.²¹ Di dalam Al Qur'an yang dimaksud infaq ialah infaq dalam hal kebaikan. Sedekah

¹⁸ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*...hal.13

¹⁹ Detri Karya dan Syamri Syamsuddin, *Makroekonomi: Pengantar Untuk Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.179.

²⁰ Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah*, Cet ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 211.

²¹ Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*,(Bandung:Tim Tafakur, 2011), hal. 19.

merupakan suatu pemberian yang dengannya kita mengharapkan pahala dari Allah SWT, pemberian yang dimaksud yaitu dapat pemberian seperti harta ataupun pemberian perbuatan yang baik.²²

b. Variabel Terikat / Variabel Dependen

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.²³

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi terhadap suatu variabel yang memberikan arti atau menyampaikan suatu operasional yang digunakan untuk mengukur suatu variabel.²⁴

a. Pengangguran

Pengangguran atau orang yang menganggur adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan serta sedang aktif untuk mencari pekerjaan.²⁵

²² Azis, *Manajemen Investasi...*, hal.239

²³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal.9

²⁴ Iswi Hariani, *Restrukturisasi dan Penghimpunan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal.234

²⁵ Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Deepublish,2018), hal.120

b. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran Pemerintah merupakan sebuah instrument yang digunakan mengukur besarnya peran pemerintah ataupun pihak swasta. Pengeluaran pemerintah juga digunakan untuk menentukan jumlah pengeluaran agregat ataupun dalam jangka pendek sebagai penentu pertumbuhan GNP riil.²⁶

c. Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

Zakat merupakan harta tertentu yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab. Infaq merupakan harta yang dikeluarkan seseorang demi kemaslahatan umum sedangkan sedekah mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak hanya mencakup materi.²⁷

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari periode ke periode yang menyebabkan pendapatan nasional riil semakin mengalami peningkatan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara umum penulisan dalam penelitian terdiri dari enam bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan menjelaskan secara detail. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

²⁶ Saharudin Didu dan Nurul Islamiah, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten, *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol.7, No.1, April 2017, hal. 78

²⁷ www.baznas.com, diakses pada 26 Juni 2021

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan hal-hal pokok dalam penulisan skripsi yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang teori yang membahas variabel/sub variabel pertama variabel kedua, dan seterusnya, menguraikan penelitian yang terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling, dan sampel penelitian; sumber data, variabel dan skala pengukuran; teknik pengumpulan data dan analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

5. Bab V Pembahasan dan Hasil Penelitian.

Pada bab ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian.

6. Bab VI Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan.

